

**PENGARUH KUALITAS SISTEM DAN KUALITAS INFORMASI TERHADAP KEPUASAN  
PENGGUNA SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH  
(PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI)  
THE EFFECT OF SYSTEM QUALITY AND INFORMATION QUALITY ON SISTEM INFORMASI  
KEUANGAN DAERAH USER SATISFACTION  
(AT SUKABUMI GOVERNANCE DISTRICT)**

<sup>1</sup>Muhammad Rizqi Kusumah Nagara <sup>2</sup>Sri Rahayu, S.E., M.Ak., Ak., CA <sup>3</sup>Annisa Nurbaiti, S.E., M.Si  
<sup>1,2,3</sup>Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

Email:<sup>1</sup>mrizqikn@gmail.com, <sup>2</sup>sriahayu@telkomuniversity.ac.id, <sup>3</sup>annisanurbaiti@telkomuniversity.ac.id

---

#### ABSTRAK

Keberadaan teknologi informasi memberikan dampak yang besar bagi segala aspek, penggunaan teknologi informasi pun tak luput dari segala jenis sektor termasuk pemerintah penggunaan teknologi informasi pada pemerintah didukung oleh PP No. 56 tahun 2005 pada pasal 1 ayat 15 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Dalam praktiknya penerapan SIKD di Indonesia belum sepenuhnya memuaskan jika ditinjau dari aparat pemerintah yang telah menggunakan paket aplikasi tersebut. Variabel independen pada penelitian ini adalah kualitas sistem dan kualitas informasi. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepuasan pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna baik secara simultan maupun parsial. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi berganda, dengan teknik survey dimana keseluruhan populasi dijadikan sampel objek penelitian. Dengan menggunakan sampel sensus, diperoleh 30 responden sebagai pengguna SIKD. Data diperoleh menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna SIKD. Sedangkan secara parsial kualitas sistem tidak berpengaruh. Namun kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna SIKD.

Kata kunci : *Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kepuasan Pengguna, Sistem Informasi Keuangan Daerah*

---

#### ABSTRACT

The existence of information technology has a great impact for all aspects, the use of information technology was can't be spared from all sectors including government use of information technology on government supported by PP. 56 year 2005 on article 1 verse 15 on Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). In practice, the application of SIKD in Indonesia has not been fully satisfactory in terms of government apparatus who have used the application package. Independent variables in this research are system quality and information quality. Dependent variable in this research is user satisfaction. This study aims to determine the effect of system quality and information quality on user satisfaction either simultaneously or partially. The research method used is multiple regression analysis, with survey technique where the whole population is used as sample of research object. Using a census sample, 30 respondents were selected as SIKD users. The data were obtained by using questionnaires. The result of simultaneous research shows that there is significant influence between system quality and information quality to SIKD user satisfaction. While the partial system quality has not effect to SIKD user satisfaction. But the information quality affects the user satisfaction SIKD.

Keywords : *System Quality, Information Quality, User Satisfaction, Sistem Informasi Keuangan Daerah*

---

#### Pendahuluan

Keberadaan teknologi informasi memberikan dampak yang besar bagi segala aspek baik proses bisnis, transaksi, organisasi, hingga kehidupan manusia sehari-hari. Teknologi informasi menjadi sebuah alat bagi manajemen dalam mengumpulkan informasi, mengelola bisnis, dan membuat keputusan berharga bagi kelangsungan organisasi. Teknologi informasi tidak lepas kaitannya dengan sistem informasi, dengan dukungan sistem informasi yang baik, teknologi informasi yang digunakan sudah barang tentu akan membuat informasi yang dibutuhkan menjadi lebih efektif, efisien serta ekonomis (Firdaus dan Suryo, 2012).

Penggunaan teknologi informasi pun tak luput dari segala jenis sektor termasuk pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, membuat provinsi serta kabupaten/kota memiliki kewenangannya sendiri untuk mengatur pemerintahan pada masing-masing daerah, hingga pengelolaan dan pelaporan keuangan. Pengelolaan tersebut baik pemerintahan maupun keuangan, tercakup dalam area khusus yang dibina oleh pemerintah seperti perumahan, pelabuhan, perkebunan, badan otoritas, pertambangan, perhutanan, perkotaan, kawasan wisata dan lain sebagainya (Rinaldi, 2012).

Penggunaan teknologi informasi pada pemerintah didukung oleh PP No. 56 tahun 2005 pada pasal 1 ayat 15 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang menyatakan bahwa sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Dalam penerapan SIKD pemerintah, pemerintah wajib untuk menggunakan SIKD seperti yang tercantum dalam PP no 55 tahun 2015 serta PERMENDAGRI No 13 tahun 2006. Namun dalam praktiknya dari jumlah 524 pemda yang berada di Indonesia, sebanyak 361 atau 68,89% pemda telah menggunakan sistem informasi keuangan, dan 163 pemda atau 31,11%, belum diketahui secara pasti sistem yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah, selain itu pengelolaan keuangan daerah yang digunakan oleh pemda juga masih tidak seragam. Sebanyak 223 pemda menggunakan SIMDA, 68 pemda menggunakan SIKD, 123 pemda menggunakan sistem lain, dan 110 pemda tidak menggunakan sistem informasi (Halim, A, Jaya, Wihana, dan Azis, Nasir, 2012).

Dalam praktiknya pada SIKD, penerapan SIKD di Indonesia belum sepenuhnya memuaskan jika ditinjau dari aparat pemerintah yang telah menggunakan paket aplikasi tersebut, hal ini ditunjukkan oleh jurnal yang dirilis oleh DJPK yang berpendapat bahwa dalam implementasi SIKD, aparat pemerintah merasa kebingungan akan acuan yang digunakan, interpretasi yang berbeda-beda terhadap laporan yang dihasilkan, yang dampaknya pelanggaran kewajiban atau kewenangan oleh aparat pemerintah daerah akibat perbedaan aturan yang digunakan oleh pemerintah daerah tidak terhindarkan (Budiriyanto, 2013). Dalam menilai sebuah sistem informasi dibutuhkan sebuah instrument yang digunakan untuk menilai bagaimana sistem itu digunakan. Dalam penelitian ini digunakan tiga variabel yang diambil dari DeLone dan McLean (1992) yaitu kualitas sistem, kualitas informasi dan kepuasan pengguna.

## **2. Dasar Teori dan Metodologi Sistem**

Menurut Hall (2011) sistem merupakan kumpulan atau kelompok yang terdiri dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan atau subsistem-subsistem untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Azhar Susanto (2013:22) sistem merupakan kumpulan/grup dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu.

### **Sistem Informasi**

Menurut Sutabri (2012:46), Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Menurut Sutarman (2012:13), Sistem informasi adalah sistem yang dapat didefinisikan dengan mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Seperti sistem lainnya, sebuah sistem informasi terdiri atas *input* (data, instruksi) dan *output* (laporan, kalkulasi).

### **Sistem Informasi Keuangan Daerah**

Menurut PP No 56. Tahun 2005 pasal 1 Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

### **Kualitas sistem**

Menurut DeLone & McLean (1992) kualitas sistem berfokus pada aspek kegunaan dan karakteristik pemakaian sistem pada penilaian sebuah sistem. Terkait dengan penilaian kepuasan pengguna maka kualitas sistem dapat digunakan sebagai parameter untuk menentukan kepuasan pengguna terhadap sistem yang dipakai. Menurut Urbach Muller (2011) kualitas sistem merupakan sebuah dimensi karakteristik yang diinginkan dari sebuah sistem informasi, dan juga mempengaruhi sistem informasi itu sendiri, sedangkan menurut Steinbert dan

Romney (2005:5) Berkaitan dengan pengembangan suatu sistem dan agar sistem tersebut dapat memenuhi harapan pemakainya, sistem yang dibuat harus berkualitas sehingga harapan pemakai untuk meningkatkan kinerja dapat tercapai. Oleh karena itu, mengapa setiap pengembangan sistem harus berkualitas. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas sistem mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Zaied, Abdel Nasser H. (2012), Livari, Juhani (2005), DeLone dan McLean (1992) yaitu faktor manusia, integrasi sistem, waktu respon.

### **Kualitas Informasi**

Menurut DeLone dan McLean (1992) kualitas informasi mengukur kualitas output dari sistem informasi, yaitu kualitas yang dihasilkan oleh sistem informasi. Sedangkan menurut Urbach dan Muller (2011) kualitas informasi merupakan sebuah karakteristik output sistem informasi. Stair dan Reynold (2010:6-7) menyatakan bahwa informasi yang tersedia haruslah berharga, maka dibutuhkan sebuah karakteristik informasi untuk menyatakan informasi tersebut berharga bagi sebuah organisasi. Srinivasan (1985) sebagai salah satu dasar penelitian DeLone dan McLean (2003) dalam penelitiannya mengemukakan informasi yang baik adalah informasi yang akurat, relevan, dapat dipahami, dan tepat waktu. Begitupula dengan pernyataan Forslund (2007) mendukung indikator kualitas informasi tersebut, selain itu juga informasi yang baik seharusnya sangat berguna untuk pengambilan keputusan (Rivard dan Huff, 1985), serta informasi tercakup lengkap (Mitler dan Doyle, 1987). Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas sistem mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Zaied, Abdel Nasser H. (2012), Livari, Juhani (2005), yaitu tepat waktu, akurat, lengkap, relevan.

### **Kepuasan Pengguna**

Menurut Urbach dan Muller (2011) kepuasan pengguna merupakan sebuah dimensi penilaian dalam menilai kesuksesan sistem informasi. Menggunakan kepuasan pengguna sebagai parameter penilaian kesuksesan akan sangat membantu ketika penggunaan sistem informasi tersebut tidak dinilai dari intensitas penggunaan sistem. Hal tersebut sesuai dengan model yang dibuat dan diuji oleh DeLone dan McLean (1992) yang menyatakan bahwa kesuksesan implementasi sistem dapat dilakukan dengan menggunakan parameter kepuasan pengguna sebagai acuan kesuksesan implementasi sebuah sistem. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas sistem mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Zaied, Abdel Nasser H. (2012), Livari, Juhani (2005), DeLone dan McLean (1992) yaitu kepuasan informasi dan kepuasan secara keseluruhan.

### **Metodologi**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem, dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna sistem informasi keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan alat bantu kuesioner. Populasi penelitian seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, dengan jumlah sampel 30 responden user SIKD. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *Census Sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linier berganda.

### **3. Pembahasan**

Tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem, dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna sistem informasi keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Dengan menggunakan pengujian hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan, pengujian hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya suatu pengaruh dari variabel-variabel bebas (X) secara bersama-sama atas suatu variabel tidak bebas (Y) digunakan uji F. Hasil pengujian hipotesis secara simultan dengan menggunakan SPSS Versi 23.0 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17.146	2	8.573	6.844	.004 <sup>b</sup>
	Residual	33.821	27	1.253		
	Total	50.967	29			

Sumber: Data Primer yang telah diolah SPSS 23.0 (2017)

Berdasarkan output pada tabel 1 didapat nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05 atau 0,004 < 0,05. Dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima yang artinya secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Kualitas Sistem (X<sub>1</sub>), dan Kualitas Informasi (X<sub>2</sub>) terhadap Kepuasan Pengguna (Y) SIKD pada pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi.

Analisis pengaruh parsial digunakan untuk mengetahui seberapa erat pengaruh masing-masing variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Dengan bantuan program SPSS Versi 23.0 maka dapat diperoleh nilai uji parsial (uji t) sebagai berikut ini:

**Tabel 2**  
**Hasil Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.934	3.362		2.955	.006
	Kualitas Sistem	-.149	.105	-.254	-1.422	.167
	Kualitas Informasi	.346	.094	.657	3.680	.001

a. Dependent Variable: Kepuasan Pengguna

Sumber: Data Primer yang telah diolah SPSS 23.0 (2017)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2, untuk hipotesis pertama yaitu Kualitas Sistem (X<sub>1</sub>) diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,167 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  atau 0,167 > 0,05. Sehingga, H<sub>0</sub> diterima yang artinya bahwa secara parsial variabel Dukungan Manajemen Puncak (X<sub>1</sub>) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pengguna (Y) SIKD pada pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi.

Hipotesis kedua yaitu variabel Kualitas Informasi (X<sub>2</sub>), diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  atau 0,001 < 0,05. Sehingga, H<sub>0</sub> ditolak yang artinya bahwa secara parsial variabel Kualitas Informasi (X<sub>2</sub>) berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna (Y) SIKD pada pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi.

### **Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi terhadap Kepuasan Pengguna SIKD pada pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi**

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.42 diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0.001 atau dibawah 0.05 maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima yang artinya secara simultan Kualitas Sistem, dan Kualitas Informasi berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam meningkatkan kepuasan pengguna SIKD dibutuhkan dukungan Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi maka kepuasan pengguna SIKD akan semakin tinggi.

### **Pengaruh Kualitas Sistem terhadap Kepuasan Pengguna**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukkan pada tabel 3 diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0.167 atau diatas 0.05 sehingga  $H_0$  diterima yang berarti secara parsial variabel kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna SIKD pada pemerintah daerah kabupaten sukabumi. Artinya jika kualitas sistem semakin baik belum tentu pengguna puas pada SIKD yang diterapkan di pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Alasan yang dapat disebabkan untuk hasil ini adalah sulitnya integrasi data antar unit dilihat dari 4,4% responden menyatakan bahwa responden ragu bahwa SIKD mudah untuk mengintegrasikan data antar unit. Dengan sulitnya integritas data antar unit, akan menyebabkan pengguna tidak puas dikarenakan pengguna SIKD memerlukan usaha lebih untuk dapat mengintegrasikan data dari SKPD pada server SIKD di daerah Kabupaten Sukabumi. Dalam banyak kasus, aparat pemerintah merasa kebingungan akan penggunaan SIKD sehingga hal ini menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda yang pada akhirnya terjadilah pelanggaran kewenangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Sistem yang baik perlu dicanangkan oleh pemerintah daerah dikarenakan dengan kualitas sistem yang baik, kesalahan penggunaan sistem oleh pemerintah daerah dapat dikurangi atau dicegah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyono (2009), Tan & Aliyah (2015), Wartini & Yasa (2016) yang menyatakan bahwa secara parsial kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna.

### **Pengaruh Kualitas Informasi terhadap Kepuasan Pengguna**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukkan pada tabel 3 diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0.01 atau dibawah 0.05 sehingga  $H_0$  ditolak yang berarti secara parsial variabel kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna SIKD pada pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Artinya semakin tinggi tingkat Kualitas Informasi, maka pengguna SIKD akan semakin puas Hal ini didukung oleh hasil pengujian statistik deskriptif mengenai ketepatan waktu informasi skor rata-rata persentase tanggapan responden sebesar 86,6%, yang berarti ketepatan waktu SIKD pada pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi tergolong sangat baik. Selain itu dalam memproses data SIKD responden merasa bahwa data yang dihasilkan SIKD akurat hal ini ditunjang dengan skor rata-rata indikator akurat sebesar 83,3% yang menunjukkan bahwa keakuratan data yang dihasilkan SIKD tergolong baik. Dalam memproses informasi selain dibutuhkan ketepatan waktu dan keakuratan data, dibutuhkan kelengkapan data dan data yang relevan, dalam hal ini responden merasa bahwa kelengkapan data yang dihasilkan oleh SIKD tergolong baik hal ini dapat ditunjukkan dengan skor rata-rata indikator lengkap sebesar 81,3%, selain itu data yang dihasilkan oleh SIKD dianggap relevan oleh pengguna, hal ini dapat ditunjukkan dengan skor rata-rata tanggapan responden mengenai relevansi data yang dihasilkan SIKD sebesar 85% yang artinya data yang dihasilkan SIKD dianggap relevan oleh responden. Hal ini menunjukkan bahwa dengan informasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, dan relevan, pengguna merasa puas dengan kualitas informasi yang ada pada SIKD yang digunakan. Kualitas Informasi penting untuk diperhatikan dengan baik, hal ini dikarenakan informasi dengan kriteria tepat waktu, akurat, lengkap, dan relevan akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengolah data keuangan pemerintah daerah, sehingga *output* informasi yang dihasilkan oleh SIKD andal dan dapat dipercaya sehingga tidak ada multitafsir maupun salah tafsir pada informasi baik dalam mengolah laporan keuangan pemerintah daerah maupun keluaran hasil yang dihasilkan SIKD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh aplikasi pelaporan keuangan pemerintah itu sendiri merupakan sebuah bentuk pengelolaan keuangan negara serta sebagai pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN sepanjang tahun berjalan sehingga perlu mencapai akuntabilitas dan transparansi yang baik. Laporan keuangan ini juga berperan penting dalam pengambilan keputusan manajemen satker untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyuni (2011), dan Nursudi (2014).

### **Kesimpulan**

Dari hasil pengujian dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu secara simultan, diperoleh bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna SIKD pada pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial, diperoleh bahwa Kualitas Sistem secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna SIKD pada pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, Kualitas Informasi secara parsial berpengaruh terhadap keberhasilan Kepuasan Pengguna SIKD pada pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi.

### Daftar Pustaka

- [1]Arifin, J. F., & Pratolo, S. (2012). Pengaruh kualitas sistem informasi keuangan daerah terhadap kepuasan aparatur pemerintah daerah menggunakan model delone dan mclean. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 13(1), 28–34.
- [2]Azhar Sustanto. 2013. Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Lingga Jaya.
- [3]BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). 2016. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Tahun 2015. BPK RI. Jakarta.
- [3]Budiriyanto, Eko. 2013. Kajian Legal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD): Disharmonisasi peraturan perundangan. Artikel. Kementerian Republik Indonesia.
- [4]DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992). Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable. *Information Systems Research*, 3(1), 60–95.
- [5]Delone, W.H and E.R McLean. 2003, The DeLone and McLean Model Of Information System Success : A Ten Year Update, *Journal Of Information System*
- [6]Dewi, S. A. N. T., & Dwirandra, A. (2013). Sang Ayu Nyoman Trisna Dewi 1 Fakultas Ekonomi Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional bertujuan untuk percepatan trans, 1, 196–214.
- [7]Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS* (Cetakan Ke-4). Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- [8]Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS* (Cetakan ke-7). Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- [9]Halim, Abdul, Jaya Wihana Kirana dan Nasir Azis. 2012. Legalitas, Peluang dan Hambatan Pembangunan Sistem Informasi Keuangan Negara dan Daerah (E-SIKD) yang Terintegrasi. Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- [10]Hall, James. A. (2007). Sistem Informasi Akuntansi (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- [11]Iivari, J. (2005). An Empirical Test of the Model of Information System Success. *The DATA BASE for Advances in Information Systems*, 36(2), 8–27.
- [12]Rivard, S., dan Huff, S.L. 1985. An Empirical Study of Users as Application Developers. *Information & Management*, Vol. 8 No. 2, February, pp. 89-102
- [13]Mulyono, I., & Malang, P. N. (2009). Uji Empiris Model Kesuksesan Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Sikd ) Dalam Rangka Peningkatan Transparansi Dan, *SNA 12 Pal*.
- [14]Noor, Juliansyah. (2011). *Metodologi Penelitian* (Edisi 1). Jakarta: Kencana.
- [15]Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi nomor 27 tahun 2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan SPIP Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- [16]PERMENDAGRI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [17]Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2015
- [18]Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 pasal 1 ayat 15 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
- [19]Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- [20]Rianse, Usman dan Abdi. (2012). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- [21]Rinaldi, U. (2012). Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, 8, 105–113.
- [22]Rivard, S., dan Huff, S.L. 1985. An Empirical Study of Users as Application Developers. *Information & Management*, Vol. 8 No. 2, February, pp. 89-102
- [23]Romney, Romney F., dan Steinbart, Paul J. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi* (Edisi 13). Jakarta: Salemba Empat.
- [24]Seddon, P. B., & Kiew, M. (1995). A partial test and development of delone and mclean’s model of is success 3, 4(1), 90–109.
- [25]Sedarmayanti dan Hidayat, S, (2011). *Metodologi Penelitian*. Bandung : CV. Mandar Maju
- [26]Sekaran, Uma. (2011). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- [27]Sekaran, Uma. (2014). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- [28]Setyo, D., & Rahmawati, D. A. (2015). Pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 6(1), 1–11.
- [29]Smith, Diana Garcia. (2007). Testing A Model To Predict Successful Clinical Information System. Dissertation. The University of Arizona.
- [30]Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.

- [31]Sutarman. 2009. Pengantar Teknologi Informasi. Yogyakarta: Bumi Aksara
- [32]Stair, Ralph., Georges Reynolds (2012). *Fundamental of Information System*. Boston. Course Technology
- [33]Tan, D., & Aliyah, S. (2015). Pengujian Kesuksesan Sistem Informasi Model Delone &. *University Research Colluqium*, 111–122.
- [34]Tata Sutabri. 2012. Konsep Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi.
- [35]Urbach, N., & Müller, B. (2011). The Updated Delone and McLean Model of Information System Success. *ReseachGate, Vol 1, Int*(September 2016).
- [36]Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- [37]Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara.
- [38]Wartini, N. N., & Yasa, I. G. W. M. (2016). ( SIKD ) PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Sejalan dengan bergulirnya otonomi maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan asas-asas pemerintahan dengan prinsip demokras, 5, 1411–1438.
- [39]Zaied, A. N. H. (2012). An Integrated Success Model for Evaluating Information System in Public Sectors. *Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences*, 3(6), 814–825.